

DAFTAR BACAAN

Buku

- Efendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- M. Hadjon, Philpus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1988.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Parlindungan, A.P., *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Santoso, Urip, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah - Buku Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- , *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, cetakan ke-6, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- , *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2010.
- , *Perolehan Hak Atas Tanah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2011.

Soebekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1981.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sukanti Hutagalung, Arie dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Karya, Jakarta, 2010.

Jurnal dan Majalah

Santoso, Urip, "*Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 12 (1) Januari 2012.

-----, "*Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta*", *Jurnal PERSPEKTIF*, Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli 2010.

Winarsi, Sri, "*Wewenang Pertanahan pada Era Otonomi Daerah*", Makalah.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (LNRI Tahun 1960 No. 104 ; TLNRI No. 2043)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (LNRI Tahun 2003 No. 47, TLNRI No. 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (LNRI Tahun 2004 No. 5 ; TLNRI No. 4355)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (LNRI Tahun 2012 No. 22 ; LNRI No. 5280)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (LNRI Tahun 2014 No. 244 ; TLNRI No. 5587)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (LNRI Tahun 2014 No. 246 ; TLNRI No. 5589)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. (LNRI Tahun 1996 No. 58 ; TLNRI 3643)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LNRI Tahun 1997 ; TLNRI 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LNRI Tahun 2012 No. 5; TLNRI 5272)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.